



# RENCANA KERJA 2024



**HUMANIS    ADAPTIF    DEDIKATIF    INKLUSIF    RESPONSIF**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

JL. Taman Pahlawan Nomor 9 Purwakarta  
Email: [Dinsosp3a@purwakartakab.go.id](mailto:Dinsosp3a@purwakartakab.go.id)  
Website: [Dinsosp3a.purwakartakab.go.id](http://Dinsosp3a.purwakartakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P3A Kab Purwakarta Tahun 2024. Penyusunan Renja ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Perda No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah Penjabaran dari janji kampanye Kepala Daerah terpilih yang di rumuskan melalui pencapaian visi dan misi, strategi arah kebijakan dan program prioritas.

Renja Dinsos P3A Tahun 2024 ini memuat uraian program dan kegiatan Dinsos P3A dalam tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja Dinsos P3A dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta.

Harapan kami semoga Renja Dinsos P3A Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang .....	1
2. Dasar Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah .....	11
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu .....	14
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN .....	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	21
3.3 Program dan Kegiatan .....	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	23
BAB V. PENUTUP .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD). Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Dinsos P3A adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA Dinsos P3A 2024 adalah sebagai berikut :

- Melakukan Review RPJMD dan Renstra Dinsos P3A
- Melakukan Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten

#### Purwakarta TA 2024

- Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinsos P3A Tahun lalu
- Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran
- Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan
- Merumuskan Usulan Pagu Indikatif dan prakiraan anggaran
- Menyusun Dokumen Rancangan RENJA Dinsos P3A
- Melakukan Review Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional kedalam RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.2 Dasar Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
  18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 237) ;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16)
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024.

Tujuan disusunnya RENJA Dinsos P3A Tahun 2024 adalah sebagai dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta bidang keluarga berencana yang terpadu dengan perencanaan tingkat provinsi, nasional maupun kabupaten . Rencana pelaksanaan juga dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu anggaran yang sedang disusun maupun prakiraan maju.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta disusun Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA Dinsos P3A, proses penyusunan RENJA Dinsos P3A keterkaitan antara RENJA Dinsos P3A dengan dokumen RKPD, Renstra Dinsos P3A, dengan RENJA Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### 2.1. *Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinsos P3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinsos P3A*

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Dinsos P3A sudah disahkan.
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Dinsos P3A berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun-tahun sebelumnya.

Melakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinsos P3A tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinsos P3A mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinsos P3A dan/atau realisasi APBD untuk Dinsos P3A

#### 2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos P3A*

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Dinsos P3A berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

*2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinsos P3A*

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P3A.

*2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

*2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

*3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Menjelaskan hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P3A.

*3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinsos P3A*

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P3A yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinsos P3A.

### *3.3. Program dan Kegiatan*

Menjelaskan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SPM
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Permasalahan dan solusi
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinsos P3A, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta terkait dengan kewenangan dan urusan sebagaimana diatur dalam Pembagian Urusan Pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu Urusan Sosial termasuk dalam salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinsos P3A sudah mengakomodir untuk pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan SPM, melalui pelayanan dasar luar panti.

Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun-tahun sebelumnya

Program utama yang dilaksanakan dan merupakan kewenangan Dinsos P3A tahun 2024 yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial sesuai dengan visi RPJPD “ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Beraakhlakul Karimah”, Misi ke 2 yakni Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial,
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial,
- 4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana.

Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja. Sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas keluarga,
- 4) Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan HAK Anak
- 6) Program Perlindungan khusus Anak
- 7) Program urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

### **Isu Isu Strategis**

Adapun Isu strategis pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan yaitu sbb :

1. Ketersediaan data terpilah gender hasil-hasil pembangunan belum aktual diperoleh, hal ini menyulitkan evaluasi capaian pembangunan laki-laki dan perempuan, penyebabnya adalah

Kurangnya pemahaman terkait Perencanaan dan Penanganan yang responsif gender dan kurangnya sosialisasi ke tiap OPD sehingga pada tahun 2024 akan diimplementasikan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

-Membentuk tim driver dama SK Bupati Purwakarta yang beranggotakan Bappelitbangda,

Inspektorat, BKAD dan Dinsos P3A

- Membentuk SK Bupati Purwakarta tentang Tim Vokal Poin yang terdiri dari perwakilan pegawai

dari Tiap OPD

- Membentuk Pokja dari berbagai elemen baik tim Akademisi maupun aktifis pemerhati gender

2. Satu indikator kinerja yang ditambahkan mulai di tahun 2024 (di dalam indikator Perjanjian Kinerja/PK) karena dipandang sangat mewakili peningkatan pemberdayaan perempuan adalah “Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen” yang ditetapkan sebesar 22% untuk 2022 (sementara itu kondisi jumlah perempuan birokrat pada tahun 2021 sebesar 18.33%).

3. Belum Terbentuk nya Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tiap kecamatan sehingga pada tahun 2023 pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten kota diharapkan mampu Penguatan Lembaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Yang pada saat ini hanya ada 3 Puskesos di 2 kecamatan Bungursari dan satu di kecamatan kiarapedes

4. Belum tersedianya SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu

dimana masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di satu tempat. Pada tahun 2023 di masukan ke dalam program jaman perlindungan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota.

5. Belum Tersedianya Rumah Aman untuk pelayanan kepada Gelandangan Pengemis, Orang Terlantar. Mengusulkan Pemindahtanganan Aset Provinsi kepada Pemkab Purwakarta berupa Koordinasi dan surat usulan Ke Bidang Aset BKAD Kab Purwakarta dan Usulan ke Pemerintahan dan BPKAD Pemprov Jabar.

## **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINSOS P3A KABUPATEN PURWAKARTA 2018 - 2023**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dan pencapaian Kinerja Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinsos P3A melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Renja Tahun 2024 menetapkan 13 (tiga belas) Program yang terkait untuk dilaksanakan Dinsos P3A

Kabupaten Pwk melalui 31 (tiga puluh satu) kegiatan terdiri dari 86 sub kegiatan, dengan alokasi Rp.11.691.448.264 dengan realisasi sd Tw III TA 2022 sebesar Rp. 6.396.684.965,00 dengan tingkat realisasi 54,56%.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB PURWAKARTA**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Dasar pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023 menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Sosial Belum dapat diterapkan keseluruhan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta karena anggaran dan lembaga serta SDM dalam penanganan bidang sosial masih terbatas. Keberhasilan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Barat dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**DINAS SOSIAL P3A Tahun Anggaran 2024**

Kode				SUB UNIT	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output Belanja
<b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	6	1	2	1	Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	6	1	2	3	Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	6	1	2	5	Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	6	1	2	6	Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	6	1	2	7	Sekretariat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	6	1	2	1	Sekretariat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	6	1	2	5	Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1	6	1	2	5	Sekretariat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	6	1	2,1	2	Sekretariat Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
1	6	1	2,1	9	Sekretariat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1	6	1	2,1	11	Sekretariat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1	6	1	2,1	1	Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	6	1	2,1	3	Sekretariat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	6	1	2,1	4	Sekretariat Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	6	1	2,1	5	Sekretariat Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	6	1	2,1	8	Sekretariat Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	6	1	2,1	9	Sekretariat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	6	1	2,1	10	Sekretariat Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	6	1	2,1	11	Sekretariat Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	6	1	2,1	9	Sekretariat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	6	1	2,1	10	Sekretariat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	6	1	2,1	2	Sekretariat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	6	1	2,1	4	Sekretariat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	6	1	2,1	1	Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
1	6	1	2,1	2	Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	6	1	2,1	9	Sekretariat Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	6	1	2,1	10	Sekretariat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					

1	6	2	2			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	6	2	2	1	Bidang Rehdavastos	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	2	Bidang Rehdavastos	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	3	Bidang Rehdavastos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2	4	Bidang Rehdavastos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
1	6	4	2			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
1	6	4	2	1	Bidang Rehdavastos	Penyediaan Permakanan
1	6	4	2	3	Bidang Rehdavastos	Penyediaan Alat Bantu
1	6	4	2	5	Bidang Rehdavastos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	6	4	2	6	Bidang Rehdavastos	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	6	4	2	8	Bidang Rehdavastos	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	6	4	2			<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>
1	6	4	2	2	Bidang Rehdavastos	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	6	4	2	4	Bidang Rehdavastos	Penyediaan Sandang
1	6	4	2	11	Bidang Rehdavastos	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	6	4	2	14	Bidang Rehdavastos	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1	6	5				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
1	6	5	2			<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>
1	6	5	2	1	Bidang Linjamsos	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1	6	5	2	2	Bidang Linjamsos	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1	6	5	2	3	Bidang Linjamsos	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1	6	5	2			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	6	5	2	1	Bidang Linjamsos	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	6	5	2	2	Bidang Linjamsos	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	6	5	2	3	Bidang Linjamsos	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1	6	5	2	4	Bidang Linjamsos	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1	6	6				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
1	6	6	2			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>
	6	6	2	1	Bidang Linjamsos	Penyediaan Makanan
	6	6	2	2	Bidang Linjamsos	Penyediaan Sandang
1	6	6	2	3	Bidang Linjamsos	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	6	6	2	4	Bidang Linjamsos	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	6	6	2	5	Bidang Linjamsos	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	6	6	2			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>
1	6	6	2	1	Bidang Linjamsos	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1	6	6	2	2	Bidang Linjamsos	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1	6	7				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
1	6	7	2			<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>
1	6	7	2	1	Sekretariat	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	6	7	2	2	Sekretariat	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2	8	2				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>

2	8	2	2			<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	2	2	1	Bidang PP	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2	8	2	2	2	Bidang PP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	2	3	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	8	2	2	4	Bidang PP	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	8	2	2			<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	2	2	1	Bidang PP	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	2	2	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	2			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	2	2	1	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	2	3	Bidang PP	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
2	8	3	2			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	3	2	1	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	2	2	Bidang PPA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2			<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	3	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2	2	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	2			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	3	2	4	Bidang PPA	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
2	8	4	2			<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	4	2	1	Bidang PP	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2	2	Bidang PP	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2	3	Bidang PP	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	2			<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	4	2	1	Bidang PP	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	5				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
2	8	5	2			<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	5	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
2	8	6	2			<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	6	2	1	Bidang PPA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	2			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
2	8	6	2	1	Bidang PPA	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
2	8	7	2			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	8	7	2	3	Bidang PPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya untuk mengintegrasikan dan menselaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, disusunlah klasifikasi dan nomenklatur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, dan dalam rangka melaksanakan Visi RPJPD Kabupaten Purwakarta yaitu **“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”** disusun serangkaian program dan kegiatan-kegiatan yang tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Misi ke 2 RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup” . Maka visi dan misi yang sudah ditetapkan tersebut harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dengan diformulasikannya tujuan strategis organisasi perangkat daerah ini, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai dasar operasionalisasi dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana Alam dan Sosial
2. Meningkatnya upaya penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu, perlu diidentifikasi pula

keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan

dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel TC.33

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>8.086.000.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>7.599.000.000</b>
a.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>72.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>42.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	8.200.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	8.300.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.300.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	14.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.200.000		
b.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>6.317.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>6.220.000.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	6.300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	6.200.000.000		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000
<b>c.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>20.000.000</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	20.000.000
<b>d.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>181.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>140.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	81.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	60.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	30.000.000
<b>e.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>436.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>245.000.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	25.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	10.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
<b>f.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>90.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>65.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	35.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 Unit	35.000.000	
<b>g.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>695.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>642.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	570.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	520.000.000	
<b>h.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>270.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>225.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	40.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	90.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	65 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	45.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>283.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>255.000.000</b>
<b>a.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>283.000.000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>255.000.000</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	68.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	192 Orang	70.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	35.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	75.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	120.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	70.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	60.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Lembaga	40.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>30.000.000</b>
<b>a.</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>					<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>30.000.000</b>

	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pemulangan Warga Migran yang Terfasilitasi	-		- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pemulangan Warga Migran yang Terfasilitasi	25 Orang	30.000.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>540.000.000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>778.300.000</b>	
<b>a.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>330.000.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>580.300.000</b>	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	60.000.000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	40.300.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	150.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30.000.000	

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	40 Orang	60.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	50 Orang	45.000.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	-		-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	20 Orang	20.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	60.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	40.000.000

	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	60.000.000		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	-		-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	30 Orang	50.000.000		
	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40.000.000		
<b>b.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>210.000.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>198.000.000</b>			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	55.000.000		
	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50.000.000		Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	55.000.000		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000		
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	35 Lembaga	60.000.000		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	50 Dokumen	48.000.000		
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					<b>838.120.728</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					<b>600.000.000</b>	<b>30</b>

<b>a.</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>65.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>45.000.000</b>
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20.000.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	15.000.000
<b>b.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>773.120.728</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>555.000.000</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	559000 Orang	95.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	559000 Orang	75.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	107598 Keluarga	132.779.300	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	107598 Keluarga	100.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30701 Keluarga	495.341.428	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30701 Keluarga	350.000.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	50.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30.000.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>305.215.565</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>213.974.986</b>
<b>a.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>210.215.565</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>163.974.986</b>

	Penyediaan Makanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	50.000.000	Penyediaan Makanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	48.974.986	
	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	45.000.000	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	45.215.565	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	40.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000	
<b>b.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>95.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	30.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	20.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	65.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	30.000.000	

7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				250.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				190.000.000
a.	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				250.000.000	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				190.000.000
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	900 Makam	200.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	900 Makam	150.000.000
8	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				426.000.000	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				260.000.000
a.	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				220.000.000	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				135.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan	2 Dokumen	55.000.000					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk	0 Perangkat Daerah	65.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk	27 Perangkat Daerah	40.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	50.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	50.000.000
b.	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				96.000.000	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				75.000.000

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekoomi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	40.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekoomi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
<b>c.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>110.000.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	35.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	75.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>306.499.716</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>205.000.000</b>	
<b>a.</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>208.499.912</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>95.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68.499.912	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tim Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	140.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	60.000.000	
<b>b.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>48.000.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>60.000.000</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang Korban Kekerasan	28.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	30.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Layanan	30.000.000	
<b>c.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>49.999.804</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.804	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>445.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>120.000.000</b>	
<b>a.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>330.000.000</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi	5 Perangkat	170.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan	-	-	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	-	-	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	60.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	50.000.000	

b.	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			115.000.000	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			70.000.000			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	115.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	70.000.000	
11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>			45.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>			40.000.000			
a.	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			45.000.000	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			40.000.000			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	45.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	40.000.000	
12	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			148.181.523	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			140.000.000			
a.	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			40.628.215	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			40.000.000			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Orang	40.628.215	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	40.000.000	
b.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			107.553.308	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			100.000.000			
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	107.553.308	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000	
13	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			33.632.943	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			25.000.000			
a.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			33.632.943	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			25.000.000			

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	33.632.943	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25.000.000	
<b>TOTAL</b>				<b>11.706.650.475</b>	<b>TOTAL</b>				<b>10.456.274.986</b>	

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan	
1				2	3	4	5	6	
1	6	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
1	6	1	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	06	01	2,01	01	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
1	06	01	2,01	03	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		
1	06	01	2,01	05	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		
1	06	01	2,01	06	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
1	06	01	2,01	07	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
1	6	1	2,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	06	01	2,02	01	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan		
1	06	01	2,02	05	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
1	6	1	2,03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1	06	01	2,03	05	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan		
1	6	1	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	06	01	2,05	02	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		

1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	
1	06	01	2,07	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	

1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				
1	6	2	2,03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	192 Orang	
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Lembaga	
1	6	3			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				
1	6	3	2,01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pemulangan Warga Migran yang Terfasilitasi	25 Orang	
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				
1	6	4	2,01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	

1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
1	06	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	
1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	
1	6	4	2,02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	

1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	50 Dokumen	
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				
1	6	5	2,01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	
1	6	5	2,02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	559000 Orang	
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	107598 Keluarga	
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30701 Keluarga	
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				
1	6	6	2,01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	
1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	

1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1	6	6	2,02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				
1	6	7	2,01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	900 Makam	
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
2	8	2	2,01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	27 Perangkat Daerah	
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	
2	8	2	2,02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				

2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	8	2	2,03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
2	8	3	2,01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	
2	8	3	2,02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Layanan	
2	8	3	2,03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2	08	03	2,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	8	4			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
2	8	4	2,01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	

2	8	4	2,03	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	
2	8	5		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>					
2	8	5	2,01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
2	8	6		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>					
2	8	6	2,01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	
2	8	6	2,02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	
2	8	7		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>					
2	8	7	2,03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	

R.C. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				✓ 9.666.274.986			9.787.171.677	
1 6 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				✓ 7.599.000.000			7.618.171.677	
1 6 1 2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				42.000.000			46.000.000	
1 06 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓ 9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Dokumen	10.000.000
1 06 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kabupaten Purwakarta	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	✓ 8.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Dokumen	8.500.000
1 06 01 2,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Purwakarta	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	✓ 8.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Dokumen	8.500.000

1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Purwakarta	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4 Laporan	10.000.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5 Laporan	9.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.220.000.000</b>			<b>6.253.000.000</b>
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purwakarta	50 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50 Orang/Bulan	6.230.000.000
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purwakarta	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Laporan	23.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	20 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20 Laporan	20.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>140.000.000</b>			<b>80.000.000</b>
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Purwakarta	75 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80 Paket	-

1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purwakarta	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 Orang	50.000.000
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purwakarta	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50 Orang	30.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>245.000.000</b>			<b>268.171.677</b>
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purwakarta	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	25.000.000
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	21.171.677
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purwakarta	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	100.000.000
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Purwakarta	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	52.000.000
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purwakarta	15 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15 Laporan	27.000.000
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purwakarta	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20 Laporan	24.000.000
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Dokumen	9.000.000

1	06	01	2,07	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	10.000.000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>65.000.000</b>				<b>70.000.000</b>
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purwakarta	10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10 Unit	35.000.000	
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10 Unit	35.000.000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>642.000.000</b>				<b>648.000.000</b>
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purwakarta	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	122.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Laporan	125.000.000	
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purwakarta	19 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	520.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		19 Laporan	523.000.000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>225.000.000</b>				<b>233.000.000</b>
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purwakarta	8 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10 Unit	50.000.000	
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purwakarta	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Unit	43.000.000	

1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Unit	95.000.000
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		20 Unit	45.000.000
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>255.000.000</b>				<b>271.000.000</b>
1	6	2	2,03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>255.000.000</b>				<b>271.000.000</b>
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	192 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		192 Orang	73.000.000
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	17 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		17 Orang	80.000.000
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	30 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Keluarga	78.000.000
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	38 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		38 Lembaga	40.000.000
1	6	3			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>30.000.000</b>				<b>35.000.000</b>

1	6	3	2,01	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>30.000.000</b>				<b>35.000.000</b>
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Pemulangan Warga Migran yang Terfasilitasi	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25 Orang	35.000.000
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>778.300.000</b>			<b>833.000.000</b>
1	6	4	2,01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>580.300.000</b>				<b>625.000.000</b>
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Purwakarta	40 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 Orang	45.000.000
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewewenangan Kabupaten/Kota	40.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30 Orang	45.000.000
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30 Orang	100.000.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 Orang	35.000.000

1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		25 Orang	40.000.000
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	50 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		75 Orang	50.000.000
1	06	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Purwakarta	20 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		20 Orang	25.000.000
1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	85.000.000
1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		25 Orang	45.000.000

1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	65.000.000
1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		55 Orang	50.000.000
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Purwakarta	20 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	40.000.000
1	6	4	2,02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					<b>198.000.000</b>				<b>208.000.000</b>
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Purwakarta	40 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		40 Orang	60.000.000
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	40 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		40 Orang	58.000.000
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Purwakarta	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Orang	45.000.000

1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	48.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Dokumen	45.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>600.000.000</b>				<b>620.000.000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	2,01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>45.000.000</b>				<b>50.000.000</b>
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	22.000.000
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		25 Orang	13.000.000
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Purwakarta	25 Orang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		25 Orang	15.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	2,02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>555.000.000</b>				<b>570.000.000</b>
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	559000 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		562000 Orang	80.000.000
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	107598 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		109598 Keluarga	100.000.000

1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Purwakarta	30701 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		31501 Keluarga	360.000.000
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	30.000.000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>213.974.986</b>				<b>220.000.000</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2,01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>163.974.986</b>				<b>165.000.000</b>
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Kabupaten Purwakarta	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	48.974.986	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Orang	50.000.000
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Kabupaten Purwakarta	40 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		40 Orang	50.000.000
1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Purwakarta	1 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Unit	40.000.000

1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	15.000.000
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Purwakarta	30 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Orang	10.000.000
1	6	6	2,02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>				<b>55.000.000</b>
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	1 Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Kampung	20.000.000
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Purwakarta	21 Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		21 Orang	35.000.000
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>190.000.000</b>				<b>190.000.000</b>
1	6	7	2,01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>190.000.000</b>				<b>190.000.000</b>
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	40.000.000

1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	900 Makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		900 Makam	150.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK</b>									<b>790.000.000</b>				<b>818.000.000</b>
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				<b>260.000.000</b>				<b>273.000.000</b>
2	8	2	2,01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan</b>				<b>135.000.000</b>				<b>143.000.000</b>
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	48.000.000
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	27 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Perangkat Daerah	45.000.000

2	08	02	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Purwakarta	27 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		30 Perangkat Daerah	50.000.000
2	8	2	2,02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>75.000.000</b>				<b>75.000.000</b>
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	75.000.000
2	8	2	2,03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>				<b>55.000.000</b>
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	55.000.000
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>205.000.000</b>				<b>220.000.000</b>
2	8	3	2,01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>95.000.000</b>				<b>105.000.000</b>

2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	40.000.000	
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	40 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Perangkat Daerah	65.000.000	
2	8	3	2,02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>60.000.000</b>				<b>65.000.000</b>
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	50 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Orang	35.000.000	
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	75 Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		100 Layanan	30.000.000	
2	8	3	2,03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>50.000.000</b>				<b>50.000.000</b>

2	08	03	2,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	50.000.000
2	8	4			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>120.000.000</b>				<b>120.000.000</b>
2	8	4	2,01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000</b>				<b>50.000.000</b>
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	3 Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 Laporan	50.000.000
2	8	4	2,03		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>70.000.000</b>				<b>70.000.000</b>
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	5 Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10 Layanan	70.000.000
2	8	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>40.000.000</b>				<b>40.000.000</b>
2	8	5	2,01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>40.000.000</b>				<b>40.000.000</b>
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	40.000.000
2	8	6			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>140.000.000</b>				<b>140.000.000</b>

2	8	6	2,01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				40.000.000			-	40.000.000
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	50 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75 Organisasi	40.000.000
2	8	6	2,02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				100.000.000				100.000.000
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	75 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100 Orang	100.000.000
2	8	7		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				25.000.000				25.000.000
2	8	7	2,03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				25.000.000				25.000.000
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga an Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Dokumen	25.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>10.456.274.986</b>				<b>10.605.171.677</b>

Bantuan kelurahan  
dari AMPU / Jkat  
Kab/Kota

Jumlah Ampu yg diperlukan  
Bantuan kelurahan khusus (org)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023  
Kabupaten Purwakarta**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah th 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun ke (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah th.2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1 6 1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1 6 1	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1 06 01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1 06 01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 06 01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 06 01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1 06 01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	-	-	0	5 Laporan	5 Laporan	100
1 6 1	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									

1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	41 Orang	41 Orang	100	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	6	1	2,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	98 Dokumen	98 Dokumen	100	20 Laporan	20 Laporan	100
1	6	1	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	100	-	-	0	1 Paket	1 Paket	100
1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	-	-	0	4 Orang	4 Orang	100
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	-	-	0	40 Orang	40 Orang	100
1	6	1	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	18 Item	18 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	22 Jenis	22 Jenis	100	1 Paket	1 Paket	100
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	47 Item	47 Item	100	1 Paket	1 Paket	100
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	10098 Lembar	10098 Lembar	100	1 Paket	1 Paket	100

1	06	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	100	490 Dus	490 Dus	100	10 Laporan	10 Laporan	100
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	53 OH; 113 OH	53 OH; 113 OH	100	20 Laporan	20 Laporan	100
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	-	-	0	6 Unit	6 Unit	100
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	2 Jenis	2 Jenis	100	3 Unit	3 Unit	100
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	6 Jenis	6 Jenis	100	3 Laporan	3 Laporan	100
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	33 Orang	33 Orang	100	8 Laporan	8 Laporan	100
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100	-	-	0	5 Unit	5 Unit	100
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100	12 Unit	12 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100

1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	2 Unit	2 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>									
1	6	2	2,03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	10 Orang	10 Orang	100
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	30 Lembaga	30 Lembaga	100	19 Orang	19 Orang	100
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	50 Keluarga	50 Keluarga	100
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	21 LKSA	21 LKSA	100	21 Lembaga	21 Lembaga	100
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>									
1	6	4	2,01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>									
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	50 Orang	50 Orang	100	40 Orang	40 Orang	100

1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	49 Orang	49 Orang	100	45 Orang	45 Orang	100
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	40 Orang	40 Orang	100
1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
1	6	4	2,02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>										
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	50 Orang	50 Orang	100
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	50 Orang	50 Orang	100
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	30 Orang	30 Orang	100

1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	35 Dokumen	35 Dokumen	100
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>									
1	6	5	2,01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>									
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	40 LKSA	40 LKSA	100	40 Orang	40 Orang	100
1	6	5	2,02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	17 Orang	17 Orang	100
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	192 Keluarga	192 Keluarga	100
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	115 Orang; 26391 KK; 24 Buku	115 Orang; 26391 KK; 24 Buku	100	95 Keluarga	95 Keluarga	100

1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	25 Orang	25 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>									
1	6	6	2,01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>									
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	50 Orang	50 Orang	100
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	50 Orang	50 Orang	100
1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Unit	1 Unit	100
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	1 Lokasi	1 Lokasi	100	20 Orang	20 Orang	100
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	30 Orang	30 Orang	100
1	6	6	2,02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>									

1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	1 Item	1 Item	100	2 Kampung	2 Kampung	100
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	21 Orang	21 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>									
1	6	7	2,01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>									
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100	100	4 Ha	4 Ha	100	900 Makam	900 Makam	100
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>									
2	8	2	2,01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100

2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	-	-	0	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	50 Orang	50 Orang	50 Orang	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100
2	8	2	2,02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	120 Orang	120 Orang	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	8	2	2,03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	100	25 Organisasi	25 Organisasi	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	8	3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>											
2	8	3	2,01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										

2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100 Orang	100 Orang	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	10 Orang	10 Orang	100	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100
2	8	3	2,02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	100	50 Orang	50 Orang	100	5 Orang	5 Orang	100
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	30 Layanan	30 Layanan	100
2	8	3	2,03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										
2	08	03	2,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100 Orang	100 Orang	100	40 Orang	40 Orang	100
2	8	4		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>										
2	8	4	2,01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										

2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	20 Orang	20 Orang	100	20 Laporan	20 Laporan	100
2	8	4	2,03		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	100	100 KK	100 KK	100	100 Layanan	100 Layanan	100
2	8	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>									
2	8	5	2,01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	100	30 Orang	30 Orang	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	8	6			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>									
2	8	6	2,01		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	50 Organisasi	50 Organisasi	100
2	8	6	2,02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	50 Orang	50 Orang	100	70 Orang	70 Orang	100
2	8	7			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>									

2	8	7	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	6 Lokasi	6 Lokasi	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan rencana kerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran kedepan dan juga merupakan terjemahan teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya rencana kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun anggaran 2024.

Program dan kegiatan dibuat berdasarkan informasi perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat menangani, melayani dan meminimalisir permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, rencana kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan control terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "*Mewujudkan Purwakarta Istimewa*" dan tidak terlepas dari klasifikasi dan kodifikasi yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan rencana kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak, baik lintas Perangkat Daerah, Legislatif dan masyarakat. Semoga rencana kerja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Purwakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial P3A  
Kabupaten Purwakarta,



**H. DIDI SUARDI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660525 198803 1 008